



DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KINERJA (LKJ)



TAHUN 2017

Jl. Jenderal Sudirman – Sago
Fax / Telp. (0756) 7464239



KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2017, maka disusunlah laporan pertanggung jawaban dalam bentuk "Laporan Kinerja" Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagaimana pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2017, sudah barang tentu masih mengandung nilai – nilai positif dan negatif, namun nilai-nilai ini akan dijadikan patokan dan pedoman , guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa – masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Kepegawaian	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	4
2.1 Perencanaan Kinerja	4
2.2 Revisi Perjanjian Kinerja	8
2.3 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Pengukuran Kinerja	11
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	11
3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	12
3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017	15
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA 2017
2. INDIKATOR KINERJA
3. PRESTASI-PRESTASI



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.1	Tujuan dari Misi Renstra	6
Tabel	2.1.2	Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra	6
Tabel	2.2.1	Revisi Perjanjian Kinerja	8
Tabel	2.3.1	Perjanjian Kinerja	10
Tabel	2.3.2	Program dan Anggaran 2017	10
Tabel	3.2.1	Capaian Indikator Kinerja	12
Tabel	3.3.1	Prediket Capaian Indikator Kinerja	13
Tabel	3.3.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja	13
Tabel	3.3.3	Capaian Kinerja Sasaran 1	13
Tabel	3.3.4	Capaian Kinerja Sasaran 2	14
Tabel	3.4.1	Target dan Realisasi P.A.D	16
Tabel	3.4.2	Realisasi Anggaran Tahun 2017.....	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan 3



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2017, merupakan tahun pertama masa pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 1 November 2016, yang mana Dinas ini dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 tahun 2016 tanggal 28 November 2018 pada Dinas Perhubungan dibentuknya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 2 Kasubbag dan 9 Kepala Seksi.

Beban tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan selaku pemegang amanah dibidang Transportasi sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aparatur yang tangguh dan handal serta Profesional yang sesuai dengan "Lima Citra Manusia Perhubungan", apalagi sekarang ini dalam menghadapi Era Globalisasi dan Otonomisasi, maka segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi dimasa lalu, perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki.

Peran serta tugas dan tanggung jawab tersebut, yang tertuang dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 dan PP. Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, semakin hari semakin besar dan berat, sekaligus memberikan peluang pada Era Otonomisasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga mengharuskan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta secara aktif pada setiap kegiatan-kegiatan transportasi yang benar dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.



Mengenai Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2017, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesimpulan hasil evaluasi Kinerja sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didasarkan pada nilai capai/ Indikator kinerja dengan standar :
 - A. 85 % s/d 100 % : (Prediket Sangat berhasil)
 - B. 70 % s/d 85 % : (Prediket Berhasil)
 - C. 55 % s/d 70 % : (Prediket Cukup Berhasil)
 - D. 55 % s/d - : (Prediket Tidak berhasil)

2. Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dari **37** kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 menunjukkan nilai capai/indikator **97,54 %** realisasi keuangan dan **100 %** realisasi fisik yang berarti Program kegiatan yang dilaksanakan dapat **dikatakan Sangat berhasil.**

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengupayakan semaksimal mungkin dari semua potensi yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan. Peran tugas yang diemban berdasarkan Visi dan Misi Dinas selama ini perlu dipertahankan, yang nantinya akan dapat lebih meningkatkan Akuntalibilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk masa mendatang.



B A B I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang. Dibawah Sekretariat diisi 2 Orang Kepala Sub Bagian dan 3 Orang Kepala Seksi di masing-masing bidang.

1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (terlampir) terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
5. Bidang Prasarana

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah **"Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten"**.

Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Kepegawaian

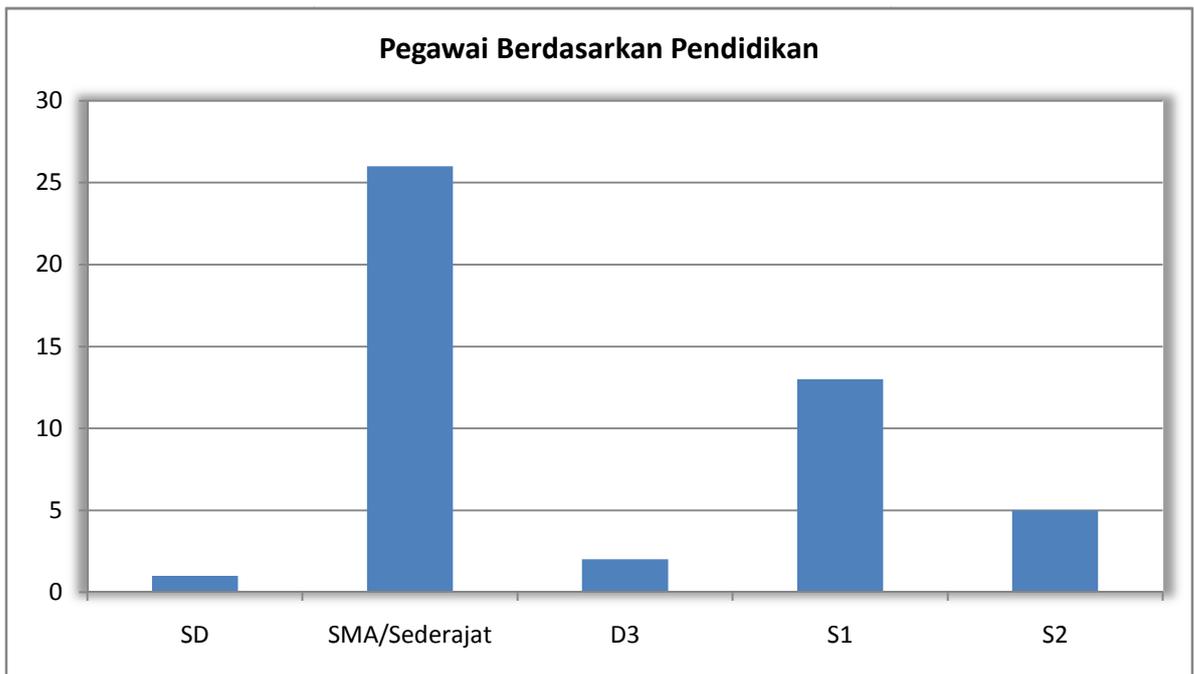
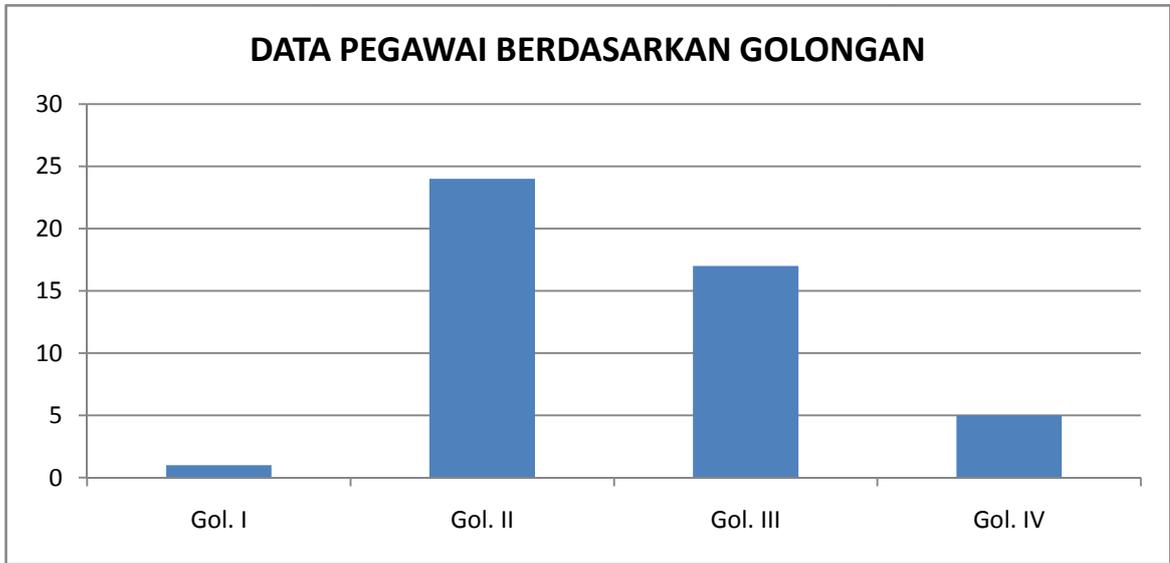
Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dihitung pada keadaan 31 Desember 2017 berjumlah 47 orang yang dapat dikelompokkan menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan.

- a. Menurut Golongan
 - Golongan I (satu) sebanyak 1 orang
 - Golongan II (dua) sebanyak 24 orang
 - Golongan III (tiga) sebanyak 17 orang
 - Golongan IV (empat) sebanyak 5 orang

- b. Menurut Pendidikan.
 - SD sebanyak 1 orang
 - SLTA sebanyak 26 orang
 - D3 sebanyak 2 orang
 - S1 sebanyak 13 orang
 - S2 sebanyak 5 orang



Gambar 1.3.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017





B A B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Tupoksi), memerlukan perencanaan yang Strategik, mulai dari penyampaian Visi dan Misi, sampai kepada cara penyampaian tujuan dan sasaran kegiatan.

1. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, lancar, aman dan nyaman guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

- a. Menjalankan administrasi perkantoran secara profesional
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
- d. Meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan transportasi

Untuk mencapai dan mewujudkan Misi dinas seperti tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan dan Tupoksinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan sumber daya manusia dan personil aparatur yang profesional serta mampu untuk menguasai perkembangan ilmu dan teknologi yang ber-orientasi Lima Citra Manusia Perhubungan, Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir selatan sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan yang dimilikinya, merupakan pelaku dan penanggung jawab penuh dari setiap kegiatan sesuai dengan (UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)



dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2000), sehingga mau tidak mau Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan harus dan mutlak memberdayakan segala potensi dan sumber daya sesuai dengan Tupoksinya untuk mencapai Visi dan Misi dinas seperti tersebut diatas dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dan badan-badan usaha serta atau orang-orang yang bergerak dibidang transportasi di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target rencana serta program yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan Dan Sasaran

Bertitik tolak dari Visi dan Misi yang diemban Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk memajukan dan mengembangkan sektor transportasi diperlukan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan.

TUJUAN

Arah kebijakan dalam rangka upaya pengembangan usaha di sektor Transportasi, diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman di Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

1. Memenuhi jumlah personil aparatur yang berkualitas dibidang perhubungan.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
3. Melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi terkait serta para pengusaha dibidang transportasi dengan pola kemitraan yang setara.
4. Meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman.
5. Meningkatkan mutu teknis sarana dan prasarana transportasi.
6. Menghindari iklim persaingan dunia usaha jasa angkutan yang tidak sehat di antara masyarakat.



Tabel 2.1.1
Tujuan dari Misi Renstra Dinas Perhubungan
Kab. Pesisir Selatan 2016-2021

TUJUAN	
Misi I : Menjalankan administrasi perkantoran secara profesional	
1	Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional
2	Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi
3	Meningkatkan disiplin aparatur
4	Meningkatkan kemampuan aparatur yang dibutuhkan dalam tata cara pemerintahan yang baik
Misi II : Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan	
1.	Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas
Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	
1.	Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Misi IV : Meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan jasa transportasi	
1.	Adanya terminal dan dermaga yang menjadi simpul transportasi di kecamatan –kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2017

SASARAN

Sasaran adalah merupakan target yang hendak dicapai atau dengan kata lain sasaran sejalan dengan target yang hendak dicapai yaitu :

Tabel 2.1.2
Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas Perhubungan
Kab. Pesisir Selatan 2016-2021

SASARAN		INDIKATOR	
Misi I : Menjalankan administrasi perkantoran secara profesional			
1.	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	1.	Jumlah aparatur Dinas Perhubungan
		2.	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
2.	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan	1.	Persentase sarana dan prasarana kerja dalam kondisi baik
3.	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	1.	Persentase peningkatan disiplin apartur
4.	Memiliki aparatur yang berkualitas dibidang administrasi	1.	Persentase aparatur yang berkopetensi dibidang pekerjaannya
		2.	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Misi II : Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan			



1.	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan di jalan	1.	Persentase kepemilikan KIR Angkutan
		2.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

1.	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	1.	Persentase pemasangan rambu-rambu
		2.	Persentase angkutan darat

Misi IV : Meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan jasa transportasi

1.	Tersedianya jaringan transportasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat	1.	Persentase terminal yang tersedia
		2.	Persentase dermaga/ tambatan perahu yang tersedia

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2017

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan yang diemban sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan guna mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka perkembangan Dinas Perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya semaksimal mungkin dengan mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Sehingga semua program dan kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik.





**2.3 Perjanjian Kinerja**

Tabel.2.3.1
PERJANJIAN KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	950.000 Orang
		Persentase Angkutan Darat	0,25%
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	7.000 Unit
2	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga	90.000 Orang
		Dermaga/ Tambatan Kapal	2

Tabel.2.3.2
Program dan Anggaran

	Program	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.025.324.990
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	897.251.500
3	Peningkatan Disiplin aparatur	103.883.800
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.500.000
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	115.048.440
6	Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	2.668.695.610
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	162.635.420
8	Peningkatan Pelayanan Angkutan	751.191.690
9	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	322.935.320
10	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	393.643.880
11	Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	154.456.300
12	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	290.063.299



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis (RENSTRA) tahun 2016–2021, yaitu pada tahun 2017 yang merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RENSTRA.

Capaian indikator diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.2. Capaian Indikator Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.1.



Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	950.000 Orang	994.743 Orang	104,71
		Persentase Angkutan Darat	0,25%	0,25%	100
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	7.000 Unit	7.370 Unit	105,29
2	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga	90.000 Orang	90.512 Orang	100,57
		Dermaga/ Tambatan Kapal	2	2	100
Rata-rata Capaian Indikator 2 Sasaran Strategis 5 Indikator Kinerja					102,11

Sumber : Dinas Perhubungan 2017

Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, capaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan 2 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebesar 102,11%.

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2016-2021. Pada Tahun 2017 ditetapkan 2 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan kinerja tahun 2017



Tabel 3.3.1
Prediket Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	PREDIKET	JUMLAH SASARAN
1	Sangat Berhasil	9
2	Berhasil	-
3	Cukup Berhasil	-
4	Kurang Berhasil	-
	Jumlah	9

Sumber : Dinas Perhubungan 2017

Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	0 s/d <55	55 s/d <70	70 s/d <85	85 s/d 100
1.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	3	103,33				Sangat berhasil
2.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut	2	100,28				Sangat berhasil
	Jumlah	5	101,81				Sangat berhasil

Sumber : Dinas Perhubungan 2017

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		Capaian
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	10	11	950.000 Orang	994.743 Orang	104,71
		Persentase Angkutan Darat	%	0,88	0,88	0,25%	0,25%	100
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	%	4,80	4,81	7.000 Unit	7.370 Unit	105,29
	Rata-Rata							103,33

Sumber : Dinas Perhubungan 2017



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 meningkatkan pelayanan transportasi darat dengan 3 indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 103,33% dengan prediket **sangat berhasil**

Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja sasaran 1 adalah :

1. Adanya koordinasi dengan instansi terkait
2. Pembinaan terhadap aparatur Dinas Perhubungan
3. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang keselamatan pelayaran transportasi laut
4. Melakukan pengawasan terhadap muatan kapal
5. Melakukan pengaturan arus lalu lintas antara lain PAM di pasar-pasar kecamatan, Festival Langkisau, PAM lalu lintas Tur de Singkarak, PAM HUT RI ke-71, operasional poskotis lebaran, razia gabungan, pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas di objek wisata Pantai Carocok Painan, PAM Natal dan Tahun Baru, PAM tamu-tamu daerah)

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengawasan dan pengendalian LLAJ
2. Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan
3. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal
4. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
5. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
6. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ
7. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Tabel 3.3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		Capaian
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
2.	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut	Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga	%	1,50	1,89	90.000 Orang	90.512 Orang	100,57
		Dermaga/ Tambatan Kapal	Unit	2	2	2	2	100
Rata-Rata								100,28

Sumber : Dinas Perhubungan 2017



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 meningkatkan pelayanan transportasi laut dengan 2 indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,28% dengan prediket **sangat berhasil**.

Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja sasaran 2 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 adalah :

1. Adanya pembinaan terhadap pemilik moda transportasi angkutan laut
2. Adanya perencanaan pembangunan dermaga/ tambatan kapal
3. Terlaksananya pengaman lalu lintas angkutan laut

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Perencanaan pembangunan dermaga/ tambatan kapal mandeh
2. Koordinasi pembangunan pelabuhan panasahancarocok painan
3. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut
4. Pembinaan dan penertiban transportasi laut

3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

Untuk lebih rincinya dalam evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat dari jumlah hasil Pendapatan Daerah sektor Perhubungan, dengan kebijaksanaan dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah dari Sektor Perhubungan.

Dalam rangka upaya Penerimaan Asli Daerah dari sektor Perhubungan yang ditarget pemasukannya sebesar Rp. **1.124.00.000,-** telah teralisasi s/d tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. **1.143.739.500,- (101,737%)** dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kinerja dinas Perhubungan sangat baik. Retribusi ini terdiri Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Untuk lebih jelasnya Penerimaan PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Tabel Target Dan Realisasi P.A.D

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A	RETRIBUSI JASA UMUM			
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	275.600.000,-	282.748.500,-	102,59
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	338.000.000,-	338.025.000,-	100,01
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,-	411.000.000,-	102,75
B	RETRIBUSI JASA USAHA			
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,-	1.085.000,-	7,23
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	95.700.000,-	110.881.000,-	115,86
	J u m l a h	1.175.000.000,-	1.280.412.500,-	101,73

2. Anggaran dan Realisasi Tahun 2017

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 6.927.630.249,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.757.122.640,- atau 97,54 %.

Tabel 3.4.2
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017
Berdasarkan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Belanja (Rp.)			Hasil / Keluaran		
		Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.025.324.990	1.006.228.239	98,14			
	Kegiatan :						
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	85.700.000	75.494.991	88,09	12 bulan	12 bulan	100



	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.100.000	257.110.000	98,85	12 Bulan	12 Bulan	100
	3. Penediaan jasa administrasi keuangan	71.737.000	71.737.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.183.000	32.433.000	97,74	1 Orang	1 Orang	100
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.054.000	16.054.000	100	12 Bulan	12 Bulan	100
	6. Penyediaan alat tulis kantor	42.221.070	42.221.070	100	12 bulan	12 bulan	100
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57.844.820	57.844.820	100	12 bulan	12 bulan	100
	8. Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12.025.000	12.025.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	15.400.000	15.400.000	100	3 Media	3 Media	100
	10. Penyediaan makan minum	36.235.000	33.560.000	92,62	12 Bulan	12 Bulan	100
	11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	163.000.000	162.101.758	99,45	12 bulan	12 bulan	100
	12. Rapat koordinasi dalam daerah	159.500.000	159.175.000	99,80	12 bulan	12 bulan	100
	13. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	59.325.100	58.071.600	97,89	12 bulan	12 bulan	100
	14. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	13.000.000	13.000.000	100	1 Orang	1 Orang	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	<u>897.251.500</u>	<u>886.307.350</u>	<u>98,78</u>			
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasioanl	533.450.000	532.871.100	99,89	6 Unit	6 Unit	100
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	126.500.000	126.500.000	100	4 Paket	4 Paket	100
	3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	237.301.500	226.936.250	95,63	12 Bulan	12 Bulan	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	<u>103.883.800</u>	<u>103.883.800</u>	<u>99,95</u>			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (PDH)	103.883.800	103.883.800	99,95	116 Paket	116 Paket	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	<u>42.500.000</u>	<u>41.476.650</u>	<u>97,59</u>			
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	42.500.000	41.476.650	97,59	1 Paket	1 Paket	100
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	<u>115.048.440</u>	<u>113.907.956</u>	<u>99,01</u>			
	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	115.048.440	113.907.956	99,01	12 Bulan	12 Bulan	100



6	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	<u>2.668.695.610</u>	<u>2.548.075.476</u>	<u>95,48</u>			
	1. Koordinasi pembangunan pelabuhan panasahan carocok painan	52.487.630	51.074.025	97,31	12 Bulan	12 Bulan	100
	2. Pembangunan Dermaga /Tambatan Perahu	110.017.500	108.203.744	98,35	2 Paket	2 Paket	100
	3. Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (DAK)	2.455.000.000	2.341.979.877	95,40	5 Unit	5 Unit	100
	4. Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (Penunjang DAK)	51.190.480	46.817.830	91,46	5 Unit	5 Unit	100
7	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	<u>162.635.420</u>	<u>160.059.920</u>	<u>98,42</u>			
	1. Rehabilitasi/pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	66.500.200	64.141.450	96,45	2 paket	2 paket	100
	2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana fasilitas Pos Retribusi (TPR)	96.135.220	95.918.470	99,77	2 paket	2 paket	100
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	<u>751.191.690</u>	<u>739.390.190</u>	<u>98,43</u>			
	1. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	30.860.350	30.814.900	99,85	1 WTN	1 WTN	100
	2. Pengawasan dan pengendalian LLAJ	145.511.340	145.064.540	99,69	12 bulan	12 bulan	100
	3. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut	94.398.300	94.036.550	99,62	12 bulan	12 bulan	100
	4. Pembinaan dan penertiban transportasi perhubungan laut	100.698.500	99.357.750	98,67	12 bulan	12 bulan	100
	5. Pelajar Pelopor Keselamatan Berjalan Lintas	32.778.000	32.690.500	99,73	1 Paket	1 Paket	100
	6. Pemilihan Sopir Teladan (Abdi Yasa)	29.034.500	29.034.500	100	1 Paket	1 Paket	100
	7. Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	317.910.700	308.391.450	97,01	12 bulan	12 bulan	100
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	<u>322.935.320</u>	<u>322.864840</u>	<u>99,98</u>			
	1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	322.935.320	322.864840	99,98	1 Paket	1 Paket	100
10	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	<u>393.643.880</u>	<u>392.333.780</u>	<u>99,67</u>			
	1. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	393.643.880	392.333.780	99,67	12 bulan	12 bulan	100
11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	<u>154.456.300</u>	<u>153.881.140</u>	<u>99,63</u>			
	1. Pelayanan terminal dan perparkiran	154.456.300	153.881.140	99,63	12 bulan	12 bulan	100
12	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<u>290.063.299</u>	<u>288.763.299</u>	<u>99,55</u>			
	1. Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	290.063.299	288.763.299	99,55	12 bulan	12 bulan	100



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai.

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan :

1. Tugas pokok dan fungsi telah berjalan dengan baik.
2. Potensi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mendatang akan menjadi lebih baik dan kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam peningkatan kinerja .

Saran :

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan masih dirasakan kurang dan perlu adanya tenaga teknis terutama bagian perencanaan dan pelaporan, manajemen Lalu lintas, pengawas trafic light, operator komputer dan tenaga teknis lainnya.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan demi terlaksana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Februari 2018

KEPALA

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

**INDIKATOR URUSAN WAJIB DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	935.796	1.108.880	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000
2	Jumlah uji KIR angkutan umum	9954	8895	5200	7200	7700	8200	8700	8700
3	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis(Angkutan Umum)	2	2	2	3	4	5	6	6
4	Persentase Layanan Angkutan darat	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,00
	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100 \%$								
5	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	2,33	4,81	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,7
	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki kir pada tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada tahun n}} \times 100 \%$								
6	Pemasangan rambu-rambu	12,75	2,36	0	2,08	2,16	2,25	2,33	23,93
	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu- rambu pada tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100 \%$								
7	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,30	0,030	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025	0,025
	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100 \%$								
8	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	985.300	1.108.880	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000
9	Jumlah orang/ barang yang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	98.577	100.440	115.000	130.000	145.000	160.000	175.000	175.000

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Yang Mengacu Pada Revisi RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase rambu yang terpasang di jalan Kabupaten Pesisir Selatan	12,75 %	15,11 %	15,11 %	17,19 %	19,35 %	21,60 %	23,99 %	

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2017

Tabel 2.2.1
Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KETERANGAN	
Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi		
1	Terlaksananya tugas kedinasan dengan baik, cepat dan akurat	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	1. Jumlah tugas kedinasan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	20%	950.000 Orang	Penyesuaian dengan Perubahan RPJMD
2	Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan akan keselamatan dalam bertransportasi		2. Tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas	Persentase Angkutan Darat	20%	0,25%	
3	Terciptanya keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan		3. Tingkat keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	20%	7.000 Unit	
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut	1. Jumlah pelayanan angkutan kepada masyarakat	Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga	20%	90.000 Orang	Penyesuaian dengan Perubahan RPJMD
5	Penanganan daerah rawan kecelakaan lebih efektif, efisien dan berkesinambungan		2. Jumlah penanganan daerah rawan kecelakaan	Dermaga/ Tambatan Kapal	20%	2 Unit	
6	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ						
7	Terlaksananya peningkatan pembangunan dermaga						
8	Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat						
9	Optimalnya kinerja pengujian kendaraan bermotor						
10	Meningkatkan PAD di sektor pelayanan pengujian kendaraan bermotor						
11	Terlaksananya pengelolaan parkir yang tertib dan berdampak pada						

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KETERANGAN	
Sebelum Revisi		Sesudah Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Sebelum Revisi		Sesudah Revisi
12	Pencapaian target PAD perparkiran						
13	Pengembangan jaringan trayek transportasi						